

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Noriska Sitty Fadhila¹

Dudi Pratomo²

Siska Priyandani Yudowati³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia
e-mail: nsfadhila@gmail.com / telp: 08116611794

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah. Oleh karena itu, terjadilah tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dimana suatu perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan tidak melanggar hukum atau bersifat legal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan perhitungan *book tax different*. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Manajerial; Komisaris Independen; Komite Audit; Tax Avoidance; Book Tax Different.

ABSTRACT

Tax avoidance is mostly done by the tax-payer because it is legal. In this case there is not a violation of law, but can obtain the saving by avoid of tax. For companies, tax is expenses to reduce net profit of the company. Tax is the most biggest contributors of state income. In the government, tax avoidance could reduce the number of state revenue. This study aims to find out how the influence of managerial owned, board of commissioner and audit committee to tax avoidance. The population in the research is manufacturing companies are listed in the Indonesian Stock Exchange. By using purposive sampling in the observation period 2011-2014 with 11 sample. The data were analyze by using data panel regression with significance level 5%. The results of this study show that managerial owned and audit committee has negative significant affect on tax avoidance. Other results show that the tax avoidance activity is not affected significantly by board of commissioner.

Keywords: Managerial Owned; Board of Commissioner; Audit Committee; Tax Avoidance; Book Tax Different.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut Suandy (2014:21), perlawanan terhadap pajak terbagi atas dua yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan aktif pada umumnya tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan pajak secara aktif terbagi atas dua, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax evasion atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi

rendah. Sedang *tax avoidance* adalah tindakan penhindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Pengukuran *tax avoidanc* menggunakan rumus *Book Tax Different*. *Book tax different* merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005).

Pemerintah mengharapkan adanya sikap taat pajak dari seluruh masyarakat yang merupakan wajib pajak. Sikap taat pajak dalam arti bahwa wajib pajak selalu membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan manajemen pajak tanpa melanggar undang-undang. Tuntutan bagi perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (Tandean, 2015).

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka di Indonesia tahun 1998 pada saat krisis berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Annisa dan Kurnasih, 2012).

Penerapan *corporate governance* pada perusahaan berpengaruh dalam menentukan kebijakan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Alat ukur yang digunakan dalam penerapan *corporate governance* yaitu proksi kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

Ukuran pertama dalam penerapan *corporate governance* adalah kepemilikan manajerial. Menurut Untung dan Hartini (2006), Kepemilikan manajerial (*Managerial Ownership*) merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Dengan adanya kepemilikan manajerial tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham serta akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011).

Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaan semakin kecil dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013).

Ukuran kedua dalam penerapan *corporate governance* adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di suatu perusahaan.

Ukuran ketiga dalam penerapan *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Komite audit juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyatakan bahwa jumlah komite audit pada suatu perusahaan minimal memiliki anggota 3 orang yang diketuai oleh komisaris independen.

Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit yang berpengaruh dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan masih harus dikaji karena terdapat inkonsistensi dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap aktivitas *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Ratna (2013) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin sedikit (Winata, 2014). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adapun tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui kondisi kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 2) Untuk menganalisis apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 3) Untuk menganalisis apakah kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax different* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
- H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax different* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
- H₃: Komite audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax different* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.
- H₄: Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax different* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Objek pada penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data secara kuantitatif merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data bersifat angka, atau bisa juga bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan (Indrawan dan Yaniawati, 2014:141). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104). Variabel independen pada penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial (X_1), Komisaris Independen (X_2) dan Komite Audit (X_3). Untuk variabel dependennya yaitu *Tax Avoidance* (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yang digunakan memiliki kriteria pada tabel. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, diperoleh sebanyak 11 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria selama empat tahun. Dengan demikian jumlah observasi pada penelitian ini sebanyak 44 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan signifikansi 5% dengan aplikasi e-views.

Tabel 1.
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014.	138
2.	Dikurangi: perusahaan manufaktur yang tidak <i>Listing</i> secara konsisten di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan dari tahun 2011-2014.	(14)
3.	Dikurangi: tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan dari tahun 2011-2014.	(3)
4.	Dikurangi: tidak memiliki data lengkap mengenai kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit selama tahun 2011 sampai dengan 2014.	(90)
5.	Dikurangi: perusahaan yang mengalami kerugian dalam laporan keuangan menurut akuntansi dan laporan keuangan menurut perpajakan selama tahun 2011 sampai dengan 2014	(20)
Total Perusahaan Selama Periode Penelitian		11

Sumber: Data sekunder yang diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif variable kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit untuk memberikan informasi tentang karakteristik *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	KM	KI	KA	BTD
<i>Mean</i>	6.343	38.32	1.038	-0.001
<i>Maximum</i>	23.077	50	1.333	0.062
<i>Minimum</i>	0.001	25	1	-0.036
<i>Std. Dev.</i>	7.49	7.126	0.107	0.021
<i>Observations</i>	44	44	44	44

Sumber: Data diolah penulis (2016)

Setelah melalui beberapa pengujian untuk melakukan pemilihan model regresi data panel. Maka model *common effect* terpilih untuk dilanjutkan sebagai model regresi data panel dalam penelitian ini. Tabel 3 menyajikan hasil dari uji *common effect*.

Tabel 3.
Hasil Uji *Common Effect* (CE)

Dependent Variable: BTD
Method: Panel Least Squares
Date: 05/15/16 Time: 22:49
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KM	-0.001061	0.000396	-2.681623	0.0106
KI	0.000745	0.000398	1.871259	0.0686
KA	-0.065872	0.026997	-2.440010	0.0192
C	0.046270	0.032816	1.409980	0.1663
R-squared	0.285054	Mean dependent var		-0.000285
Adjusted R-squared	0.231433	S.D. dependent var		0.020603
S.E. of regression	0.018062	Akaike info criterion		-5.103497
Sum squared resid	0.013050	Schwarz criterion		-4.941298
Log likelihood	116.2769	Hannan-Quinn criter.		-5.043345
F-statistic	5.316093	Durbin-Watson stat		0.675544
Prob (F-statistic)	0.003531			

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0.285054 atau 28.50%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit mampu menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 28.50%. Sedangkan sisanya 71.50% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pada tabel 3, untuk uji simultan (Uji F) diperoleh F_{hitung} sebesar 5.316093 dan nilai F_{tabel} sebesar 2.84, sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0.003531 < 0.05$ maka H_4 diterima, artinya kepemilikan manajerial (KM), komisaris independen (KI) dan komite audit (KA) memiliki

pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur secara simultan atau bersama-sama.

Uji t (parsial) dilakukan untuk menentukan nilai koefisien regresi secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y) apakah signifikan atau tidak. Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Variabel KM (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.681623 dan t_{tabel} sebesar 2.02108. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu -2.681623 < 2.02108 dan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) $0.0106 < 0.05$. Sesuai ketentuan pengambilan keputusan, maka H_1 diterima, artinya kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* (BTD) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara parsial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak ingin perusahaan terkena kasus perpajakan dan sadar untuk melakukan kewajiban perusahaan dengan membayar pajak.

Variabel KI (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.000745 dan t_{tabel} sebesar 2.02108. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.000745 < 2.02108$ dan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) $0.0686 > 0.05$. Sesuai ketentuan pengambilan keputusan, maka H_2 ditolak, artinya komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak efektif dalam

melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan dan tidak dapat mempengaruhi kebijakan untuk melakukan *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI (Pohan, 2008).

Variabel KA (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2.440010 dan t_{tabel} sebesar 2.02108. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2.440010 < 2.02108$ dan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) $0.0192 < 0.05$. Sesuai ketentuan pengambilan keputusan, maka H_3 diterima, artinya komite audit memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* (BTD) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara parsial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Praktek *tax avoidance* menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena komite audit lebih ketat dan tegas dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham oleh manajerial akan membuat manajer untuk mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga membuatnya sadar untuk membayar kewajibannya yaitu pajak terhutang perusahaan. Hasil yang diperoleh ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) dan Pohan (2008) yang mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI (Pohan, 2008). Hasil yang diperoleh ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015), Annisa dan Kurniasih (2012), Kurniasih dan Sari (2013), dan Puspita dan Harto (2014) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara komisaris independen dan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Praktek *tax avoidance* menjadi lebih sulit untuk dilakukan dikarenakan komite audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hasil yang diperoleh konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Annisa dan Kurniasih (2012) dan Winata (2014) mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan pengujian analisis deskriptif, dapat disimpulkan Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 6.343% dengan standar deviasi sebesar 7.49% yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data kepemilikan manajerial periode 2011-2014 tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum kepemilikan manajerial dimiliki oleh PT Pyridam

Farma Tbk sebesar 23.077%. Sedangkan nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0.001% dimiliki oleh PT Indo Acidatama Tbk dan tahun 2012-2014 sebesar 0.002% dimiliki PT Kimia Farma Tbk.

Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 38.32% dengan standar deviasi sebesar 7.126% yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data komisaris independen periode 2011-2014 berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum komisaris independen selama tahun penelitian dimiliki oleh PT Betonjaya Manunggal Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Pelangi Indah Canindo Tbk dan PT Trias Sentosa sebesar 50%. Sedangkan nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 33.33% dimiliki oleh PT Pyridam Firma Tbk, tahun 2012 sebesar 25% dimiliki PT Nipress Tbk, pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 28.571% dan 33.33% dimiliki oleh PT Gajah Tunggal Tbk. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 1.038 dengan standar deviasi sebesar 0.107 yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data komite audit periode 2011-2014 berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum komite audit sebesar 1.333 dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2011 dan PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2011-2014. Sedangkan nilai terendah sebesar 1 pada tahun 2012-2014 dimiliki PT Kimia Farma Tbk, tahun 2011-2014 dimiliki PT Pyridam Farma Tbk, PT Nipress Tbk, PT Betonjaya Manunggal Tbk, PT Pelangi Indah Canindo Tbk, PT Indo Acidatama Tbk, PT Kabelindo Murni Tbk, PT Siantar Top Tbk dan PT Trias Sentosa Tbk.

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar -0.001 dengan standar deviasi sebesar 0.021 yang lebih tinggi dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa

data *tax avoidance* periode 2011-2014 tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum *tax avoidance* pada tahun 2011 dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk. Sedangkan nilai terendah *tax avoidance* pada tahun 2011 dimiliki oleh PT Indo Acidatama Tbk sebesar -0.019, tahun 2012-2013 dimiliki oleh PT Mandom Indonesia Tbk sebesar -0.036 dan -0.02, terakhir pada tahun 2014 sebesar -0.019 dimiliki oleh PT Pyridam Farma Tbk.

Secara simultan variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014. Secara parsial variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur periode 2011-2014 dapat dijelaskan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka tingkat kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin rendah.

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI. Komite audit memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayudan Kurniasih, Lulus.(2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap *Tax Avoidance*. E-JurnalAkuntansi& Auditing Universitas Sebelas Maret.TemaVol 8 No 2.Halaman 123-133.
- Bovi, Maurizio. (2005). *Book-Tax Gap.An Income Horse Race*.Working Paper No. 61 Desember 2005.
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukharta, I Made. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, ROA* dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.9.1(2014): 143-161. ISSN: 2302-8556
- DirJenPajak. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.(2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: DirJen Pajak. [online]. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>
- Farida, Dessy Noor. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Laba Dengan Konsentrasi Kepemilikan Sebagai Variabel Pemoderasi. STIE Bank BPD Jateng, Prestasi Vol. 9 No. 1. Halaman 21-38.
- Imanta, Deadan Satwiko, Rutji.(2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepemilikan *Managerial*.Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 13, No.1, Halaman: 67-80.
- Indrawan, Rullydan Yaniawati, Poppy.(2014). *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, danPendidikan*. Bandung: RefikaAditama.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. [online]. http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Ratna, Maria M.. (2013). Pengaruh Return on Aset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi. ISSN: 1410-4628. TemaVol 18 No 1.Halaman 58-65.

Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”. Otoritas Jasa Keuangan. [online] <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015/SALINAN-POJK%20%2055.%20Pembentukan%20dan%20Pedoman%20Pelaksanaan%20Kerja%20Komite%20Audit.pdf>

Pohan, Hotman Tohir. (2008). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio *Tobin Q*, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. [online]. <http://hotmanpohan.blogspot.co.id/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html>

Rahmawati. (2015). “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* Terhadap Biaya Utang”. Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Padang.

Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2014). *Perencanaan Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Tandean, Vivi Adeyani. (2015). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & *Call For Paper* UNISBANK. ISBN:978-879-3649-81-8. Halaman 1-8.

Lampiran
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014.	138
2.	Dikurangi: perusahaan manufaktur yang tidak <i>Listing</i> secara konsisten di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan dari tahun 2011-2014.	(14)
3.	Dikurangi: tidak menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan dari tahun 2011-2014.	(3)
4.	Dikurangi: tidak memiliki data lengkap mengenai kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit selama tahun 2011 sampai dengan 2014.	(90)
5.	Dikurangi: perusahaan yang mengalami kerugian dalam laporan keuangan menurut akuntansi dan laporan keuangan menurut perpajakan selama tahun 2011 sampai dengan 2014	(20)
Total Perusahaan Selama Periode Penelitian		11

Sumber: Data Sekunder yang Diolah.